

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**



2023

**RENJA AKHIR
PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. A.P.T. Pranoto Kel. Sukarama No.85 RT.III Telp. 0541-662053 Fax. 0541-662053

email : distransnaker.kutakart.go.id

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P-419/DISTRANSNAKER/050.4/3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD ;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RRenja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tentang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2023 |
| Pertama | : | <p>Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2023 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023; dan 2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 |

3. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
4. Melakukan Pembahasan pembahasan pengulahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Melakukan Pengkajian evaluasi kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
6. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Melaksanakan penyesuaian program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Melaksanakan penjabaran terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
10. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah;
11. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

Kedua : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditandatangani di Tenggarong
Pada Tanggal, 22 Maret 2022

KEPALA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA


Ir. H. Akhmad Hordi Dwi Putra
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19621025 199011 1 001

TEMBUSAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai laporan,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai laporan,
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kartanegara,
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P-419-DISTRANSNAKER/050.4/3-2022

Tanggal : 23 Maret 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
I.	Ir. H. Akhmad Hardi Dini Putra NIP. 19631025 199011 1 001	Pengarah
II.	M. Hatta, SE, M.Si NIP. 19670415 200012 1 003	Kasie
III.	Neni Triana, SE NIP. 19640709 199303 2 005	Sekretaris
1.	H. Aji Mohd Rommy, SE, M.Si NIP. 19791010 200112 1 006	Koordinator Sekretariat
2.	Hj. Ernawati, SE NIP. 19670717 199903 2 003	Anggota
3.	Mokhammad Zaenal Fanani, S. Soc NIP. 19720801 200901 1 003	Anggota
4.	Armada NIP. 19790902 200701 1 007	Anggota
5.	Sri Minarti Ningrah NIP. 19740731 201001 2 005	Anggota
6.	Bukri Rajal, SE NIP. 19730402 200012 1 002	Anggota
IV.	Drs. Syukur Eko Budi Santoso NIP. 19680807 199802 1 001	Koordinator Bidang Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jamuan Sosial Tenaga Kerja
1.	Drs. H. Irwadi Effendi NIP. 19660106 199603 1 008	Anggota
2.	Firman Hidayat, S. Soc NIP. 19750604 200701 1 029	Anggota
3.	Hidayat NIP. 19860112 200604 1 005	Anggota
V.	Drs. Saiful Bahri, M.H NIP. 19671006 200012 1 002	Koordinator Bidang Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.	Baharuddin, SE, M Si NIP. 19731211 200312 1 007	Anggota
2.	Manan, SP NIP. 19671203 199903 1 001	Anggota
3.	Agus Noor NIP. 19860721 201001 1 007	Anggota
4.	Lianawati, A.Md NIP. 19760501 200502 2 002	Anggota
VI.	Hamza Wardana, AP., MM NIP. 19760218 199603 1 002	Koordinator Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Transmigrasi
1.	Tarima Noor, SE NIP. 19650323 199203 1 012	Anggota
2.	Sri Pihesti, S.Pd NIP. 19671101 199303 2 007	Anggota
4.	Helda Royuni NIP. 19781215 200701 2 009	Anggota
VII.	Lukman S.Soy., M.Si NIP. 19720316 200801 1 016	Koordinator Bidang Penyajian Kawasan, Penanganan Desa dan Pemukiman Transmigrasi
1.	Mustafa Kamil, S ST NIP. 19641102 198503 1 006	Anggota
2.	Yudha Dharna Taufik, S Si Nip. 19861022 201101 1 002	Anggota
3.	Drs. Lesta Nugroho NIP. 19670505 199403 1 014	Anggota

KEPALA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra

Pemula Utama Muda - IV/c

NIP. 19621025 199011 1 001



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Visi tersebut perlu ditindak lanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua OPD sebagai kebijakan implementatif, termasuk didalamnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang kemudian dimusnahkan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan kotransmigrasian. Penyusunan RENJA dinas ini mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen ini merumuskan serta menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten kedalam Rencana Kerja Distransinaker Tahun 2023.

Demikian Rancangan Akhir Renja-PD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun untuk dapat dipedomani bagi seluruh jajaran Pejabat beserta Staf di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransinaker) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pembangunan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Agustus 2022

Kepala Dinas,


Ir. H. Ahmad Hardi Dwi Putra
Pembinu Utama Muda – IV/c
NIP. 19621025 190011 1 001



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan organisasi perangkat daerah Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendorong penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjeremahan dari visi, misi dan program organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- b. Rancangan Akhir Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dengan Perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
- c. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rancangan rencana kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2023 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis Rancangan Akhir Renja 2023 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur pengembangannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah no. 86 tahun 2017 tentang tata cara rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah, yang antara lain :

- a. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berjalan;
 - b. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
 - c. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan Indikator Kinerja Hasil (outcome) indikator Kinerja Keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
- Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan program ketragakerjaan dan ketransmigrasian adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas.



Dengan dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi (Renja OPD) tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 344; Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tahun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 510);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019



- Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/I/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 – 2014;
 28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, Sudah tidak berlaku lagi dari Tahun 2016
 29. Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 30. Kepmendagri No.050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, kodefikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 31. Kepmendagri NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 32. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 139/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2009 -2015;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
 39. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2008 tentang Urutan Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara;
 40. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



41. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 /2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
42. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
43. Perda No.9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kab.kukar
44. Perda Kab. Kukar no.6 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Kukar tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENUA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program OPD yang telah mengakomodir usulan hasil musrenbang dari tiap kecamatan Kab. Kutai Kartanegara sebagai suatu dokumen perencanaan. Rencana Kerja (RENJA) akan digunakan bagi seluruh pejabat dan staf Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan standar ukuran capaian keberhasilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi dan telah ditetapkan dalam Renstra PD dan RPJMD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021. Capaian Rencana Kerja tahun 2021 dan capaian target Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketrammigrasian. Capaian kinerja tahun 2021 didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan mencakup 8 program dengan 28 kegiatan, sebagai berikut :

Pada TA 2021 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 17.395.957.412 Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 18.864.535.053 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 16.636.460.863 dan Belanja Modal Rp. 2.228.074.190 adapun Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.489.763.541 (86,41%) dengan Realisasi Belanja Operasi Rp. 14.342.942.041 (86,21%) dan Realisasi Belanja Modal Rp. 2.146.821.500 (96,35%).

Target Belanja Distranmigrasi Kab. Kutai Kartanegara tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

Uraian	Target (Rp)	Prosentase (%)
Belanja Operasi	14.342.942.041	86,21
Belanja Modal	2.146.821.500	96,35
JUMLAH	16.489.763.541	87,41

Penyerapan Anggaran Belanja Operasi pada tahun 2021 sebesar 86,21% dari total Anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari Realisasi Anggaran dan Sasaran. Penyerapan Anggaran terbesar pada Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, dan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, sedangkan penyerapan terkecil pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan di ikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

2.1.1. Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan



sasaran strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kualitas Prestasi
Meningkatnya kompetensi dan produktif Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	5%	3,2%	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan perusahaan baru	Persentase Pencari Kerja yang terafiat ditempatkan	Persen	6,41%	4,51%	70,35	Sedang
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Persejahtaan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Kasus	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan dibangun dan dikembangkan	Kawasan	1	1	100	Sangat Tinggi
Rata-rata					94,05	Tinggi

Berdasarkan Tabel diatas, capaian indikator kinerja bidang urusan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 secara kumulatif bernilai kinerja Tinggi dengan penjelasan sebagai berikut:

• URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada tahun 2021 hanya mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu:

1. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan dibangun dan dikembangkan sebanyak 1 (satu) kawasan. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama yang diampu oleh bidang Penyediaan Kawasan Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi. Target 1 (satu) kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan



dikembangkan tersebut diatas mampu dicapai 100% melalui pelaksanaan Program Perencanaan Transmigrasi, Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi, Sub Kegiatan Penstrukturaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi yakni dengan dihasilkannya Dokumen Review Rencana Kerja Transmigrasi (RKT) Kota Bangun. Tersusunnya dokumen ini menjadi syarat utama dalam proses penetapan Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Kota Bangun dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di tahun 2022.

• URUSAN TENAGA KERJA

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada tahun 2021 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

1. Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 3%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama yang diampu bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 3% dalam realisasinya ternyata mampu dicapai melebihi target sebesar 3,2% atau sebesar 106% rasio capaian target berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Keberhasilan dalam capaian yang melebihi target tersebut diperoleh melalui pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencaker berdasarkan Kluster Kompetensi.
2. Persentase Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 6,41%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama kedua yang juga menjadi tanggungjawab bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Dengan target kinerja sebesar 6,41%, dalam realisasinya ternyata hanya mampu dicapai sebesar 4,51% atau hanya sebesar 70,35% rasio pencapaiannya. Tidak tercapainya target kinerja ini dikarenakan jumlah penempatan tenaga kerja relatif sangat kecil yakni hanya sebesar 247 orang dibandingkan dengan jumlah pencari yang terdaftar sebesar 5.458 orang. Pencapaian target kinerja kedua ini ditopang melalui pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja utama bidang Tenaga Kerja yang ketiga ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melalui pelaksanaan Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota. Atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, maka target kinerja sebesar 100% mampu dipenuhi sebesar 100% yaitu berdasarkan pada jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang mampu terselesaikan.



• REALISASI FISIK PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Realisasi fisik merupakan salah satu tolak ukur capaian kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Berbeda halnya dengan pengukuran capaian keuangan, realisasi fisik dapat diukur berdasarkan bobot dari masing-masing tahapan yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Jika suatu kegiatan telah selesai seluruhnya, maka realisasi fisiknya 100%, namun jika belum selesai maka realisasi fisiknya diukur berdasarkan jumlah kumulatif dari bobot tahapan yang telah selesai tersebut. Dalam konteks tertentu, jika dalam periode yang sama terdapat realisasi keuangan sudah pasti akan diikuti dengan realisasi fisik, akan tetapi sebaliknya adanya realisasi fisik belum tentu diikuti oleh realisasi keuangan. Sehingga kerap kali dijumpai adanya perbedaan antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik, dimana efisiensi dari sisi keuangan terkadang tidak mempengaruhi capaian secara fisik. Berikut disajikan realisasi fisik program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2021 pada tabel di bawah ini.

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN FISIKA
1.	Program Peningkatkan Kualitas Pemukiman Desa	100%	100%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Desa	100%	100%	100%
	Pembuatan Buku dan Lembar Kerja	12 Buku	12 Buku	100%
	Salinan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Tahunan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.3	Administrasi Barang Milik Desa Pada Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Salinan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Desa Pada APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.4	Administrasi Kependudukan Perangkat Desa	100%	100%	100%
	Identifikasi Suku dan Penduduk Desa	134 Orang	134 Orang	100%
	Salinan Peraturan Perundang-undangan	114 Orang	114 Orang	100%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Desa	100%	100%	100%
	Pembuatan Kampanye media cetak / Pemasangan Spanduk	122 Lembar / Lembar	122 Lembar / Lembar	100%
	Pembuatan Papan dan Pemasangan Kotak	60 Lembar	60 Lembar	100%
	Pembuatan Buletin	13 Lembar	13 Lembar	100%
	Pembuatan Barang Cetak dan Pengiriman	5 Lembar	5 Lembar	100%



No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASAH CAPAIAN FOK
	Pemanggungan Beker Koordinasi dan Komando IKPD	278 CH	278 CH	100%
1.6	Pengabdian Berbagi Milik Daerah Berjangkaj Unsur Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Pengabdian Model	11 Unit	11 Unit	100%
	Pengabdian Perbaikan dan Main Lompa	24 Unit	24 Unit	100%
	Pengabdian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100%
1.7	Penyediaan Jasa Pakajong Unsur Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Survei Wilayah	181 Lembar	181 Lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Zumber Data dan Vektor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peningkatan Kantor	172 Unit	172 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Peningkatan Umur Kantor	12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	100%
1.8	Pemeliharaan Berbagi Milik Daerah Berjangkaj Unsur Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Beker Pemeliharaan dan Pajby Kandang Perbaikan Dind dan Kandang Dind Jodan	28 Unit / 62 R4	28 Unit / 62 R4	100%
	Pemeliharaan Jasa Tdk Berwujud	1 Agilisa	0 Agilisa	0%
	Pemeliharaan / Peningkatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
2.	Program Pajathan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	100 Layanan	100 Layanan	100%
2.1	Pelaksanaan Pajathan Berdasarkan Unit Kompetensi	140 Orang	140 Orang	100%
	Proses Pelaksanaan Pajathan dan Pajathan Kemandirian bagi Pajathan Berdasarkan Kaster Kompetensi	140 Orang	140 Orang	100%
3.	Program Pajathan Tenaga Kerja	100 Layanan	100 Layanan	100%
3.1	Pajathan Antar Kerja di Daerah Kemandirian / Kota	45 Orang	45 Orang	100%
	Pajathan Kemandirian Kerja	45 Orang	45 Orang	100%
4.	Program Hubungan Industrial	100%	100%	100%
4.1	Pengasahan Pajathan Perusahaan dan Pajathan Pajathan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Wajab berpasial dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pemanggungan Pajathan dan Informasi Satera Hubungan Industrial dan Jaminan Satera Tenaga Kerja serta Pengabdian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.2	Pengasahan dan Pajathan Pajathan Hubungan Industrial Majem Kerja dan Pajathan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	120 Kasus	120 Kasus	100%



No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN FISIK
	Pemaksimalan Pemanfaatan Hubungan Industri, Modal Rata-rata dan Peningkatan Pemasukan yang berakibat / berdampak pada peningkatan di 1 sektor Daerah Kabupaten / Kota	120 Ratus	120 Ratus	100%
	Pembinaan Operasional Lembaga Keagamaan Islam di Daerah Kabupaten / Kota	22 Peningkatan	22 Peningkatan	100%
E.	Program Peningkatan Kowadik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
E.1	Peningkatan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembelaksanaan Peningkatan Tanah untuk Kowadik (Transmigrasi)	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

Sumber Data : e-updata Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2021) – Disdik

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan sub kegiatan pada anggaran tahun 2021 di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan dengan cukup baik dengan tingkat realisasi kinerja fisik sebesar 94,64%, walaupun di beberapa sub kegiatan realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 57,41%, dengan rincian sebagai berikut:



Anggaran dan Realisasi tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAOU INDIKASI	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KEJARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tidak Ukur/Indikator	Targer	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH			14.194.612.709,00	12.712.378.187,00	89,55
	Pelaksanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			283.075.000,00	274.802.879,00	76,59
1	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	204.824.000,00	171.741.879,00	83,14
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	78.251.000,00	48.061.000,00	61,34
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			9.573.537.147,00	8.344.149.431,00	87,47
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur	12	Orang	9.447.402.747,00	8.452.942.431,00	89,47
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1	Dokumen	126.134.400,00	112.127.000,00	89,23
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara			73.964.000,00	40.840.000,00	55,24
5	Sekonsultasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	73.964.000,00	40.840.000,00	55,24
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara			148.921.000,00	70.702.500,00	47,54
6	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat	Jumlah Aparatur	124	Orang	78.921.000,00	31.247.500,00	39,54



NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATOR	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KEJARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tidak terukur indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Akoratur	114	Orang	70.000.000,00	39.435.000,00	56,32
8	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum			404.345.808,00	255.435.384,00	63,42
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	182	Jenis/ Buah	17.962.000,00	18.892.000,00	105,24
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42	Jenis	34.880.800,00	34.309.750,00	98,36
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Jeda Rapat/ jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	15	Jenis	34.498.000,00	46.540.000,00	135,24
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Jenis/ Barang/ Cetakan	45.087.300,00	44.558.800,00	98,96
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akoratur yang Mengikuti Rapat/rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	298	Orang	221.831.000,00	191.404.124,00	86,28
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan			2.228.743.190,00	2.183.914.008,00	98,44
13	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel	71	Unit	145.820.000,00	144.840.000,00	99,85
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana Peralatan Kerja Kantor	24	Unit	827.643.000,00	821.269.000,00	99,22
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengembangan Unit Bangunan	3	Unit	1.743.874.190,00	1.657.874.000,00	95,67
	Penyediaan Jasa Pemeringkat Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeringkat Urutan Pemerintahan Daerah			897.721.440,00	792.887.680,00	88,33



NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATOR	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KEJARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tidak terukur indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang disediakan					
16	Penyediaan Jasa Turun Mampar	Jumlah Materi dan Perangkat yang disediakan	731	Lembar	1.991.200,00	1.990.000,00	99,75
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumbar Daya Api dan Listrik	Jumlah Rekening yang dilayani 12 Rekening x 12 Bulan	144	Rekening	197.664.000,00	117.794.711,00	59,59
18	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kendor	Jumlah Bahan Sotan Gasket dan Tabung Gas Rumah Tangga yang disediakan/Jumlah Perbaikan Kantor	373	Unit/Paket	66.667.000,00	66.220.000,00	94,78
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Pendukung Non Pns 35 Orang	430	Orb	638.204.640,00	608.662.569,00	95,41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urutan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Aset yang di pelhara			382.405.133,00	416.475.831,00	85,25
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Binaa Pemeliharaan dan Polak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas/Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25	Unit B2/B4	283.441.931,00	203.477.611,00	71,79
21	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tidak Berwujud	1	Paket	4.000.000,00	-	-
22	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor	1	Unit	294.964.000,00	292.998.280,00	99,63
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSEKERTIFIKAT KOMPETENSI			890.085.000,00	784.966.265,00	88,42
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan			890.085.000,00	784.966.200,00	88,42



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKASI	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tidak terukur indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan					
23	Proses pelatihan dan pendirian dan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja berdasarkan keterampilan kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	140	Orang	890.080.000,00	784.946.200,00	88,42
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN			481.471.430,00	451.434.440,00	94,48
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja			481.471.430,00	451.434.440,00	94,48
24	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Kesempatan Kerja	43	Orang	458.471.430,00	431.434.440,00	94,48
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERFAKULTASI			2.245.448.900,00	2.192.190.900,00	97,42
	Penegakan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang harus Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan			1.753.442.000,00	1.753.442.000,00	99,49
25	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaringan Sosial Tenaga Kerja serta Penguasaan	Terlaksananya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaringan Sosial	1	Dokumen	1.753.442.000,00	1.753.442.000,00	99,99
	Penegakan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Masalah Kerja dan Pemutusan Perusahaan di	Jumlah fasilitas Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan			238.128.900,00	238.748.900,00	83,44



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKASI	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/ KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tidak Uluir Indikator	Target	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah Kabupaten/Kota	Kemagakerjaan					
26	Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial Melalui Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Beresiko/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian dan Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial di Perusahaan	120	Kasus	112.929.000,00	68.385.000,00	78,27
27	Relaksasi Operasional Lembaga Kejasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Operasional Lembaga Kejasama Tripartit Daerah	22	Perusahaan	175.199.900,00	150.241.900,00	85,82
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa Kintan			844.344.015,00	146.891.614,00	17,40
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tertaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)			844.344.015,00	146.891.614,00	17,40
28	Pencadangan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RTR, RTRP dan Dokumen Penerapan)	1	Kawasan	844.344.015,00	146.891.614,00	17,40
JUMLAH					18.864.535.053,00	16.489.763.341,00	87,41

Berdasarkan tabel diatas Anggaran dan Realisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2021, terdapat penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.489.763.341 (87,41%) dari total pagu sebesar Rp. 18.864.535.053



Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi keuangan, akan tetapi hambatan tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi pencapaian target kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja secara keseluruhan.

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dimana masih terdapat sub kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya kurang dari 80% diantaranya adalah:

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan sebesar 58,86%.
2. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja, dengan realisasi keuangan sebesar 64,96%.
3. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan, dengan realisasi keuangan sebesar 56,62%.
4. Penyediaan Bahan Logistik, dengan realisasi keuangan sebesar 72,15%.
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan realisasi keuangan sebesar 59,59%.
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan realisasi keuangan sebesar 71,78%.
7. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, dengan realisasi keuangan sebesar 0% (Tidak dilaksanakan).
8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, dengan realisasi keuangan sebesar 78,26%.
9. Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi, dengan realisasi keuangan sebesar 17,39%.

Secara umum, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi keuangan adalah berkenaan dengan peneraian aspek administrasi, teknis, dan adanya kendala pada ketentuan regulasi yang berlaku serta kondisi pandemi COVID-19 yang belum membaik. Namun belanja-belanja tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi target kinerja kegiatan maupun program.

Secara lebih detail, di bawah ini kami berikan penjelasan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh sub-sub kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 80% sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan sebesar 58,86%.
Sub kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi dan atau melakukan proses evaluasi kinerja capaian pelaksanaan seluruh sub kegiatan di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yada ada di dalam aplikasi E-pantau.
Rendahnya capaian keuangan sub kegiatan ini yang hanya mencapai 58,86% disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang belum membaik sehingga banyak membatasi kegiatan pertemuan yang berakibat pada tidak optimalnya penyerapan rekening makanan dan minuman rapat dan rekening perjalanan dinas.
2. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja, dengan realisasi keuangan sebesar 64,96%.
Sub kegiatan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan yang berkaitan dengan monitoring evaluasi dan penilaian kinerja di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Realisasi keuangan yang hanya sebesar 64,96% disebabkan oleh keterbatasan



untuk melakukan rapat-rapat pembahasan ditengah kondisi COVID-19 yang belum membaik, penyesuaian dengan ketentuan dan aturan pengelola keuangan dan adanya penyesuaian agenda tugas narasumber sehingga beberapa rekening belanja yang terkait tidak dapat dibayarkan secara penuh dan atau maksimal seperti pada rekening Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

3. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan, dengan realisasi keuangan 36,62%.
Sub kegiatan ini ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Rendahnya realisasi keuangan tersebut disebabkan karena kondisi COVID-19 yang belum membaik dan adanya penyesuaian agenda Tim RB Dinas sehingga mengakibatkan pelaksanaan rapat-rapat pembahasan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berimplikasi pada tidak dapat dipertanggungjawabkannya beberapa rekening belanja seperti Makan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana, dan Belanja Perjalanan Dinas.
4. Penyediaan Bahan Logistik, dengan realisasi keuangan sebesar 72,15%.
Sub kegiatan ini ditujukan untuk membiayai kebutuhan makanan dan minuman kantor dan kebutuhan kebersihan kantor berupa pembelian bahan dan peralatan kebersihan. Kurang optimalnya penyerapan keuangan sebesar 72,15% disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan keuangan pada rekening makanan dan minuman rapat sebesar 60%. Hal ini sebagai akibat dari kondisi pandemi COVID-19 yang belum membaik sehingga banyak pelaksanaan pertemuan dibatasi dan/atau hanya melalui *daring online*.
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan realisasi keuangan sebesar 59,59%.
Sub kegiatan ini ditujukan untuk membiayai rekening telepon, air, listrik dan internet kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Rendahnya serapan keuangan yang hanya sebesar 59,59% disebabkan oleh kurang cermatnya dalam memperhitungkan antara kebutuhan dan pemenuhan air, listrik dan internet sehingga terdapat margin keuangan yang cukup besar yang tidak dimanfaatkan pada ketiga rekening tersebut diatas.
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan realisasi keuangan sebesar 71,78%.
Sub kegiatan ini ditujukan untuk membiayai jasa pemeliharaan dan pengurusan pajak kendaraan dinas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Kurang optimalnya serapan keuangan yang menyisakan 28,22% disebabkan oleh pengurusan pajak kendaraan dinas yang hanya dilakukan untuk beberapa unit saja. Sementara jasa pemeliharaan kendaraan dinas mampu dilaksanakan seluruhnya.
7. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, dengan realisasi keuangan sebesar 0% (Tidak dilaksanakan).
Sub kegiatan ini ditujukan untuk membiayai manajemen Website Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam bentuk biaya sewa hosting domain Website. Dikarenakan biaya sewa



hosting website yang relatif kecil dan keharusan serta dengan prosedur belanja modal software, maka diputuskan untuk mengalihkan kebutuhan hosting domain website tersebut kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara selaku perangkat daerah pengampu urusan informatika. Hal inilah yang menyebabkan sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud tidak dilaksanakan.

8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, dengan realisasi keuangan sebesar 78,26%.

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan antara karyawan dengan perusahaan. Kurang maksimalnya penyerapan keuangan disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang belum membaik sehingga banyak perusahaan menerapkan kebijakan karantina yang berakibat kegiatan fasilitasi upaya penyelesaian perselisihan HI tidak dapat dilakukan dengan optimal.

9. Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi, dengan realisasi keuangan sebesar 17,39%.

Sub kegiatan ini ditujukan untuk menyusun Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Loa Janan dan Review/Persempurnaan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Kota Bangun.

Rendahnya capaian keuangan sub kegiatan ini, dikarenakan adanya kendala teknis yaitu ketidaksesuaian antara volume pengadaan dokumen di SIPD (1,1 paket dan 6,6 Paket) dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang ada sehingga proses pengadaan belum dapat dilakukan s.d pertengahan tahun 2021.

Koreksi dari BPKAD terhadap ketidaksesuaian tersebut di dalam SIPD baru dilakukan di pertengahan bulan Agustus 2021 sehingga harus menunggu DPA perubahan pada bulan Oktober 2021. Dari kondisi ini, hanya menyisakan waktu pelaksanaan secara efektif selama dua setengah bulan saja.

Dengan sisa waktu yang ada tersebut, hanya 1 (satu) dokumen yang mampu diselesaikan yaitu Dokumen Review/Persempurnaan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Kota Bangun melalui mekanisme penyjukan langsung. Sedangkan 1 (satu) dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Loa Janan tidak dapat tersusun karena proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan hingga diperoleh hasil dokumen membutuhkan waktu minimal 4-5 bulan kalender. Hal inilah yang menyebabkan serapan keuangan sub kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi hanya sebesar 17,39%.



Tabel 1 (T-C19)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Lembar :

No	Uraian Rencana Kerja Tahun 2022 dan Tahun Berikutnya	Indikator Kinerja Utama Kawasan Strategis (KIPK)	Tahun Kerja & Capaian Program & Sub-Program Tahun 2022	Tahun Kerja & Capaian Program & Sub-Program Tahun 2023	Jumlah Target Kerja Kawasan Strategis (KIPK) (2022)	Tercapai dan Realisasi Kerja Kawasan Strategis (KIPK) dan Program Tahun 2022			Tahun Kerja & Capaian Program & Sub-Program Tahun 2022	Tercapai dan Realisasi Kerja Kawasan Strategis (KIPK) dan Program Tahun 2022	
						Tahun Kerja 2022 (2022)	Realisasi KIPK (2022)	Tahun Kerja 2022 (2022)		Realisasi KIPK (2022)	Realisasi KIPK (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Jaring Pemerintah Daerah	Nilai IKIPK, Penguatan Daerah	17	100	6126	17,00	17,00	100,00	10,11	101	171
	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja Penguatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rencana Penguatan Daerah	1	Selesai	1	1	1	100	1	11	100
2	Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Penguatan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penguatan Daerah	18	Selesai	1	1	1	1	1	18	100
3	Ekspansi Kerja Penguatan Daerah	Jumlah Laporan Ekspansi Kerja Penguatan Daerah	14	Laporan	1	1	1	1	1	14	64
	Administrasi Penguatan Penguatan Daerah	Jumlah Laporan Ekspansi Penguatan Daerah	1	Selesai	1	1	1	100	1	1	100
4	Pengadaan dan Penguatan APD	Jumlah Pengadaan dan Penguatan APD	10	Pengadaan	1	1	1	1	10	10	111
5	Gerakan dan Penguatan Kawasan, Kawasan Penguatan, Penguatan, Kawasan + 2022	Jumlah Laporan Gerakan Kawasan / Kawasan + 2022 dan Laporan Gerakan Penguatan / Kawasan Penguatan Kawasan / Kawasan + 2022	1	Laporan	1	1	1	1	1	1	61
	Administrasi Penguatan Daerah dan Penguatan Daerah	Jumlah Laporan Penguatan Daerah 2022 yang mendukung Penguatan	1	Selesai	1	1	1	100	1	1	100







No	Jenis Biaya yang Akan Dibayar oleh Peserta Kegiatan	Jumlah Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Tipe Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Kategori Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Tipe dan Kategori Biaya yang Akan Dibayar (Rp)				Jumlah Biaya yang Akan Dibayar (Rp)		
					Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Biaya yang Akan Dibayar (Rp)	Biaya yang Akan Dibayar (Rp)
21	Peserta dan Pendamping yang akan mengikuti kegiatan ini akan dikenakan biaya pendaftaran.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
22	Peserta dan Pendamping yang akan mengikuti kegiatan ini akan dikenakan biaya pendaftaran.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
23	Peserta dan Pendamping yang akan mengikuti kegiatan ini akan dikenakan biaya pendaftaran.	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
24	Peserta dan Pendamping yang akan mengikuti kegiatan ini akan dikenakan biaya pendaftaran.	4	1000	4	4	4	4	4	4	4	1000
A	Program Pelatihan bagi dan Produknya Tenaga Kerja	21,14	Peserta	21	21	21	21	21	21	21	21,14
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
B	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1000	Peserta	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		1000	Peserta	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
C	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
D	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
E	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
F	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
G	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
H	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
I	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
J	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
K	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
L	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
M	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
N	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
O	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
P	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
Q	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
R	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
S	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
T	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
U	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
V	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
W	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
X	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
Y	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
Z	Kegiatan Pelatihan dan Produknya	1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000
		1	1000	1	1	1	1	1	1	1	1000



[illegible]





2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melaksanakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Distraminaker, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai

tugas pokok :

"Membantu Bupati, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja."

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian.

Permendagri Nomor 75 tahun 2010 tentang indikator kinerja kunci (IKK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditetapkan 3 indikator kunci, yaitu:

Urusan Ketenagakerjaan

1. Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi dengan rumusan pencari kerja yang dilatih dibagi dengan data awal senstra dikali 100.
2. Pencari kerja yang terdaftar ditempatkan dengan rumusan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar dikali 100.

Urusan Ketransmigrasian

1. Perencanaan Penyediaan Pencadangan Lahan Rencana Kawasan Transmigrasi dengan target 3 rencana Kawasan pengembangan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja seperti pada tabel 2 (T-C.30) berikut :

No	Indikator Sistem	Sesuai Standar Nasional	Indikator Kinerja (Flagship Outcome) dan Kegiatan (Input) = (KPI)	Target Kinerja Berdasarkan Desain				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang ada serta dan berselaras		Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	45 Orang (71,43%)	300 Orang (14,73)	300 Orang (8,33)	300 Orang (22,43)	300 Orang (3,24%)		300 Orang (8,33)	300 Orang (22,43)	
2	Meningkatnya Penerimaan tenaga kerja sesuai informasi seluruh Pesta Kerja dan wawancara baru		Persentase Penerimaan Kerja yang sesuai dengan informasi	1,00%	14,33%	24,37%	37,40%	4,31%		24,37%	37,40%	
3	Meningkatnya hubungan industri yang harmonis		Persentase Rasio Partisipasi Hubungan Industri yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Meningkatnya Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan karir dan Peningkatan karir		Jumlah Karir dan Peningkatan yang di raih	3	3	3	3	3		3	3	
			Jumlah Karir dan Peningkatan yang di raih	3	3	3	3	3		3	3	
			Jumlah Karir dan Peningkatan yang di raih	3	3	3	3	3		3	3	
			Jumlah Karir dan Peningkatan yang di raih	3	3	3	3	3		3	3	
5	Meningkatnya Partisipasi dan Akutabilitas Kerja Siswa dan Peningkatan dan Tenaga Kerja		Partisipasi dan Akutabilitas Kerja Siswa dan Peningkatan dan Tenaga Kerja	70,17	71,33	71,40	72	69,33		71,40	72	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara guna mengurangi angka kemiskinan dan Pengangguran serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja

1. Penduduk usia kerja atau angkatan kerja Meningkat tidak diimbangi dengan peluang kerja
2. Pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas tidak di barengi dengan tersedianya SDM,
3. Terpenuhiya Penempatan tenaga kerja sesuai dengan permintaan lapangan kerja
4. Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi sebagai dampak perubahan ekonomi dan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat
5. Terjadinya PHK sepihak
6. Terpenuhiya Penempatan tenaga kerja sesuai dengan permintaan lapangan kerja
7. Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi sebagai dampak perubahan ekonomi dan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat
8. Mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah
9. Penataan persebaran penduduk

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya sudah bersinergi dengan Program/Kegiatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI juga dengan Program/Kegiatan Provinsi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah masih kurangnya sumber daya aparatur utamanya makin berkurang tenaga fungsional seperti pengantar kerja dan mediator serta masih belum adanya tenaga fungsional instruktur pelatihan. Disisi lain kebutuhan akan tenaga fungsional ini sangat mendesak untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada karena fungsi pegawai teknis ini tidak dapat tergantikan oleh PNS/ASN biasa.

Ditinjau dari teknis mempermasalahakan sebagai berikut :

a. Ketenagakerjaan:

Permasalahan :

- Tingginya tingkat pengangguran
- Rendahnya kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
- Rendahnya perlakuan kesempatan kerja



- Rendahnya keterampilan vokasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif
- Belum adanya Balai pelatihan di Kabupaten
- Belum tersedianya hasil analisis kebutuhan pelatihan
- Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial antara pengusaha dengan Pekerja/buruh
- Jaminan sosial yang kecil dan rendahnya kesejahteraan karyawan

Hambatan :

- Lokasi yang tersebar di kab. Kutai Kartanegara
- Adanya pencari kerja yang ditempatkan tidak Melapor
- Kurangnya tenaga kerja fungsional

b. Ketranmigrasian:

Permasalahan :

- Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas
- Rendahnya kualitas SDM, terutama di kawasan pedesaan
- Kurang keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi
- Kurang seimbangya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya
- Pembangunan dipedesaan relative kurang berkembang yang diakibatkan masih minimnya infrastruktur (jalan, jembatan sarana dan prasarana)

Hambatan :

- Konflik lahan/kepemilikan lahan
- Regulasi

2.3.1 Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi kepala Daerah

Kekurangan SDM dan tenaga kerja fungsional ini bisa berdampak pada tidak tercapainya kinerja OPD seperti yang telah ditargetkan, sehingga pencapaian visi dan misi Kepala Daerah khususnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja menjadi tidak optimal. Disamping hal tersebut permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan program-program sektoral untuk dapat fokus pada pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja, antara lain perluasan kesempatan kerja sektoral belum didukung tingkat kompetensi tenaga kerja yang tersedia mengingat kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai kebutuhan di pasar kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD yaitu fakta bahwa mayoritas angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah atau belum memiliki keahlian untuk memasuki pasar kerja. Angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara saat ini didominasi oleh pekerja yang kurang terampil atau low skill sehingga kurang dapat bersaing dengan pekerja diluar wilayah Kutai Kartanegara. Data Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik



(BPS) kukin menunjukkan dari 359.866 orang angkatan kerja saat ini terdapat 139.369 orang yang bekerja, dari angkatan kerja tersebut sebanyak 20.497 orang yang mencari pekerjaan/pengangguran. Dari data tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh OPD untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia demi pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Tantangan lain dalam meningkatkan pelayanan OPD adalah masuknya dunia Revolusi Industri 4.0 yang akan mengakibatkan banyak pekerjaan baru muncul, dibarengi dengan hilangnya berbagai pekerjaan yang akan mengubah kondisi sektor ketenagakerjaan secara signifikan. Tidak hanya itu, pasca Pandemi Covid-19 saat ini juga menghadirkan tantangan lain dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan dengan banyaknya pekerja yang di PHK akibat pandemi.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD yaitu terbukanya kesempatan bagi tenaga kerja yang ada di Kutai Kartanegara untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan menambah keterampilan dan skill tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja dan melakukan pelatihan bersertifikasi guna memberikan kesempatan bagi pencari kerja dalam bersaing mendapatkan pekerjaan di era Revolusi Industri 4.0

2.3.4 Rekomendasi

Rekomendasi untuk peluang kesempatan kerja yaitu memperbanyak pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing pencari kerja. Untuk kegiatan pelatihan berbasis masyarakat yang dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan, sehingga dapat berwirausaha mandiri untuk dapat berwirausaha mandiri maka diperlukan modal usaha, karena itu bantuan permodalan pasca pelatihan sangatlah diperlukan dalam upaya membina wirausaha mandiri, sehingga pada akhirnya menyerap tenaga kerja non formal.

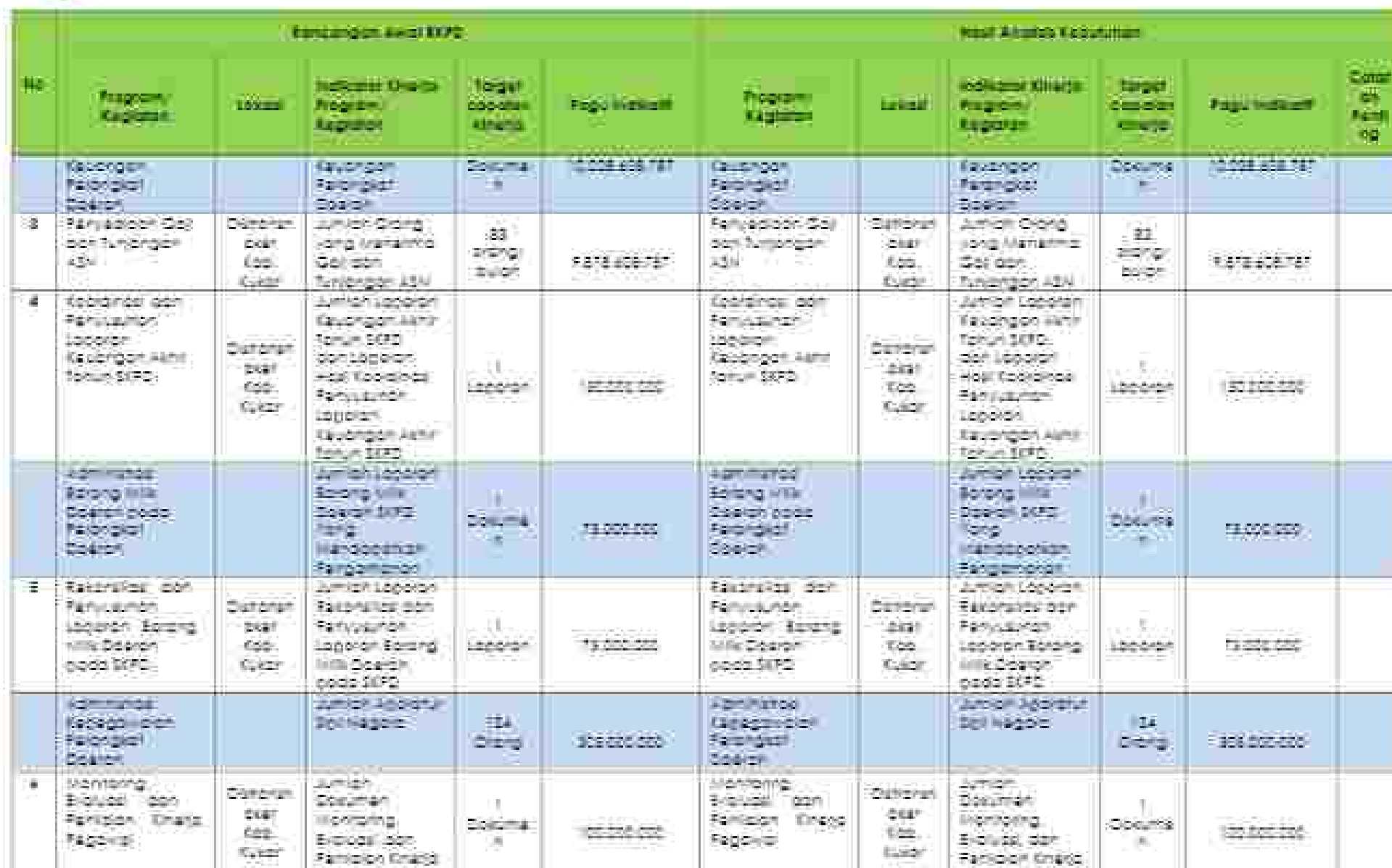


2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Untuk meningkatkan kualitas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mereview terhadap rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan pada program dan kegiatan tahun 2023, adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Unit	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tingkat capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Program/ Kegiatan	Unit	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tingkat capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Catatan Awal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGUANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAPK Peningkat Daerah	70,11%	124.970.274	PROGRAM PENGUANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAPK Peningkat Daerah	70,11%	124.970.274	
	Pengadaan, Penganggoan dan Eviden Kinerja Peningkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan dan Eviden Kinerja Peningkat Daerah	3 Dokumen	225.000.000	Pengadaan, Penganggoan dan Eviden Kinerja Peningkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan dan Eviden Kinerja Peningkat Daerah	3 Dokumen	225.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Pengadaan Peningkat Daerah	Ditaman per Kib. Fiskal	Jumlah dokumen Pengadaan Peningkat Daerah	3 Dokumen	180.000.000	Penyusunan Dokumen Pengadaan Peningkat Daerah	Ditaman per Kib. Fiskal	Jumlah dokumen Pengadaan Peningkat Daerah	3 Dokumen	180.000.000	
2	Eviden Kinerja Peningkat Daerah	Ditaman per Kib. Fiskal	Jumlah Laporan Eviden Kinerja Peningkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	Eviden Kinerja Peningkat Daerah	Ditaman per Kib. Fiskal	Jumlah Laporan Eviden Kinerja Peningkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	
Jumlah			Jumlah Laporan	3		Jumlah		Jumlah Laporan	3		





No	Rencana Kerja RPJG					Realisasi Anggaran					
	Program Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikasi	Program Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikasi	Catatan Penting
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklatasi oleh Kasi Kasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	300.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklatasi oleh Kasi Kasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	300.000.000	
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Diklatasi oleh Kasi Kasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	33 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Diklatasi oleh Kasi Kasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	33 Orang	50.000.000	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Diklatasi oleh Kasi Kasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Diklatasi oleh Kasi Kasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 Orang	35.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Administrasi Umum	12 Laporan	225.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum	12 Laporan	225.000.000	



No	Pencapaian Hasil RPJPD					Hasil Kinerja Pelaksanaan					
	Program Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tingkat pencapaian kinerja	Pagu Indikasi	Program Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tingkat pencapaian kinerja	Pagu Indikasi	Catatan Penting
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pokok	21.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pokok	21.700.000	
11	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 Pokok	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 Pokok	30.000.000	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pokok	40.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pokok	40.000.000	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pokok	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pokok	40.000.000	
14	Penyediaan Borong Cetak dan Peningkatan	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Borong Cetak dan Peningkatan yang Disediakan	4 Pokok	40.000.000	Penyediaan Borong Cetak dan Peningkatan	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Borong Cetak dan Peningkatan yang Disediakan	4 Pokok	40.000.000	
15	Penyediaan Bahan Material	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Bahan Material yang Disediakan	2 Pokok	25.000.000	Penyediaan Bahan Material	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Pokok Bahan Material yang Disediakan	1 Pokok	25.000.000	
16	Pastor Kunjungan Tami	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Laporan Pastor Kunjungan Tami	13 Laporan	25.000.000	Pastor Kunjungan Tami	Dataran 0,00 Km. Kuala	Jumlah Laporan Pastor Kunjungan Tami	13 Laporan	25.000.000	



No	Pencapaian Hasil RPJPD					Hasil Kinerja Kelembutan					
	Program/ Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target pencapaian kinerja	Pagu Indikasi	Program/ Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target pencapaian kinerja	Pagu Indikasi	Catatan Penting
17	Pemeliharaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi RPJPD	Dataran datar 1000	Jumlah laporan Pemeliharaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi RPJPD	12 Laporan	120000000	Pemeliharaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi RPJPD	Dataran datar 1000	Jumlah laporan Pemeliharaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi RPJPD	12 Laporan	120000000	
	Pengadaan Sarung, Ulat, Dasi dan Peningkat Ulat Pemeliharaan Dataran		Jumlah Ulat BMD yang disediakan	2 unit	100000000	Pengadaan Sarung, Ulat, Dasi dan Peningkat Ulat Pemeliharaan Dataran		Jumlah Ulat BMD yang disediakan	2 unit	-	
18	Pengadaan Pakaian dan Masker Lainnya	Dataran datar 1000	Jumlah Ulat BMD yang disediakan	1 unit	-	Pengadaan Pakaian dan Masker Lainnya	Dataran datar 1000	Jumlah Ulat BMD yang disediakan	1 unit	-	
19	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dataran datar 1000	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	100000000	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dataran datar 1000	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	-	
20	Pengadaan Sarung dan Pakaian Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dataran datar 1000	Jumlah unit Pakaian dan Masker Lainnya yang	1 unit	-	Pengadaan Sarung dan Pakaian Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dataran datar 1000	Jumlah unit Pakaian dan Masker Lainnya yang	1 unit	-	
	Pemeliharaan Jala Pemeliharaan Ulat Pemeliharaan Dataran		Jumlah Ulat BMD yang disediakan	1000000	1000000000	Pemeliharaan Jala Pemeliharaan Ulat Pemeliharaan Dataran		Jumlah Ulat BMD yang disediakan	1000000	1000000000	
21	Pemeliharaan Jala Sarung Lainnya	Dataran datar 1000	Jumlah laporan Pemeliharaan Jala Sarung	12 Laporan	4000000	Pemeliharaan Jala Sarung Lainnya	Dataran datar 1000	Jumlah laporan Pemeliharaan Jala Sarung	12 Laporan	4000000	



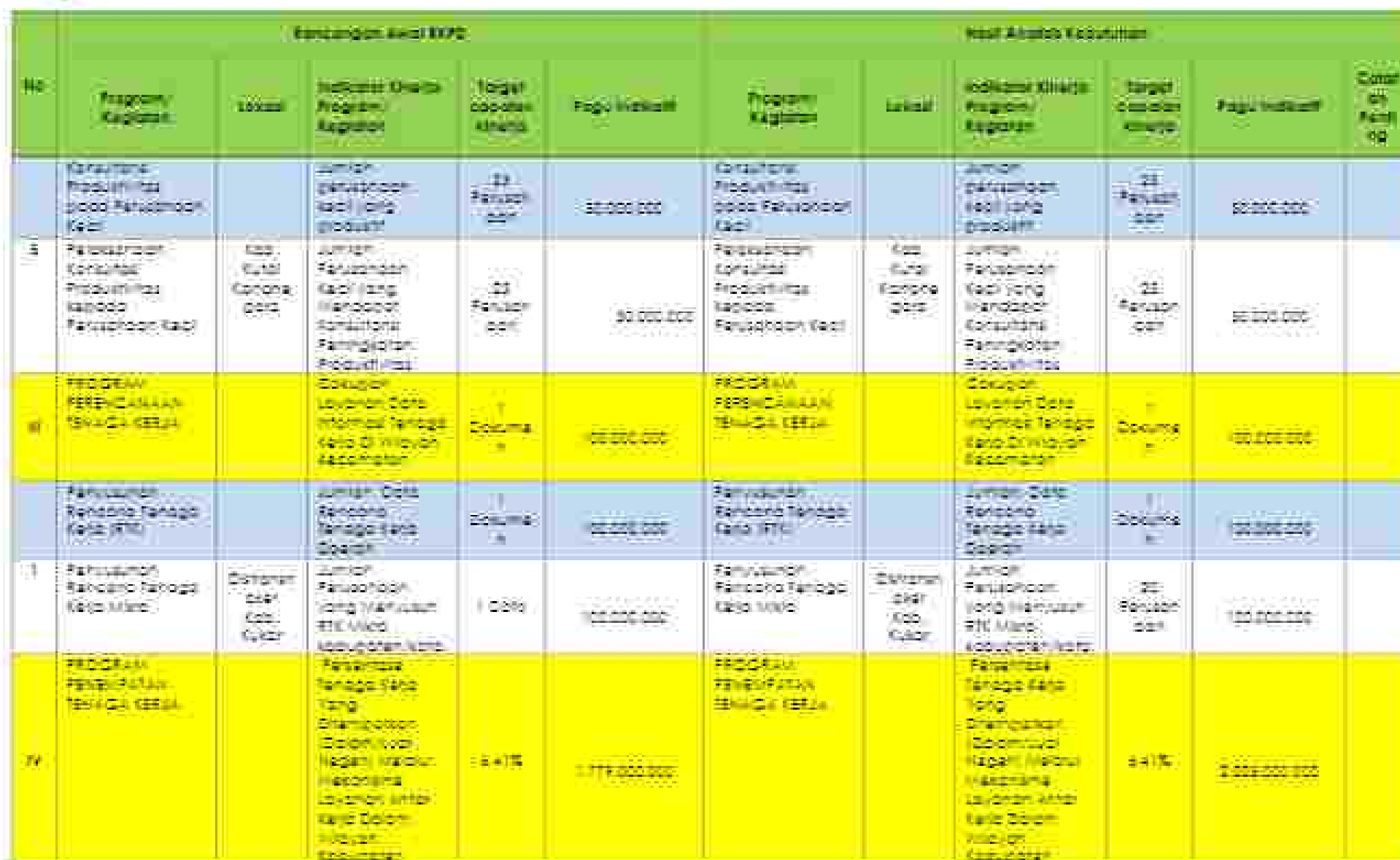
No	Rencana Kerja RPJG					Realisasi Anggaran					
	Program Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target outcome kinarya	Pagu Indikasi	Program Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target outcome kinarya	Pagu Indikasi	Catatan Penting
		Tahun	Harapan				Tahun	Harapan			
22	Pelayanan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik	Dataran datar Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	12 Laporan	300.000.000	Pelayanan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik	Dataran datar Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	12 Laporan	300.000.000	
23	Pelayanan Jasa Perawatan dan Perangkoan Kantor	Dataran datar Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Perawatan dan Perangkoan Kantor yang Diadakan	12 Laporan	8.867.000	Pelayanan Jasa Perawatan dan Perangkoan Kantor	Dataran datar Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Perawatan dan Perangkoan Kantor yang Diadakan	12 Laporan	8.867.000	
24	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dataran datar Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Diadakan	12 Laporan	471.232.936	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dataran datar Kab. Kutai	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Diadakan	12 Laporan	471.232.936	
	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemukiman umum Pemukiman Daerah		Jumlah Arah Terpapar Laminasi yang di cat ulang	24 unit	336.041.931	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemukiman umum Pemukiman Daerah		Jumlah Arah Terpapar Laminasi yang di cat ulang	24 unit	336.041.931	



No	Rencana Kerja RPJPD					Rencana Kerja RPJPD					
	Program Kegiatan	Isi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikasi	Program Kegiatan	Isi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikasi	Catatan Penting
25	Pemeliharaan Jala, Pemeliharaan Bend, Pemeliharaan dan Poda Kandang, Peningkatan Dind, dan Kandang Dind Jarak	Dataran dan Kuda	Jumlah Kandang Peningkatan Dind, dan Kandang Dind Jarak yang Dikembangkan	24 unit	275.041.931	Pemeliharaan Jala, Pemeliharaan Bend, Pemeliharaan dan Poda Kandang, Peningkatan Dind, dan Kandang Dind Jarak	Dataran dan Kuda	Jumlah Kandang Peningkatan Dind, dan Kandang Dind Jarak yang Dikembangkan	24 unit	275.041.931	
26	Pemeliharaan Jala dan Kandang	Dataran dan Kuda	Jumlah Jala dan Kandang yang Dikembangkan	1 unit	80.000.000	Pemeliharaan Jala dan Kandang	Dataran dan Kuda	Jumlah Jala dan Kandang yang Dikembangkan	1 unit	80.000.000	
27	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dataran dan Kuda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikembangkan	1 unit	300.000.000	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dataran dan Kuda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikembangkan	1 unit	300.000.000	
28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	12,83%	4.131.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	12,83%	4.131.000.000	
	Pelaksanaan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	300 orang	4.031.000.000	Pelaksanaan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	300 orang	4.031.000.000	



No	Rencana Kerja RPJ					Realisasi Anggaran					Catatan Perif 99
	Program/ Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan Satuan Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan Satuan Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi petani sayur berdasarkan konsep kompetensi	18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	300 Orang	3.300.000.000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi petani sayur berdasarkan konsep kompetensi	18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	300 Orang	3.300.000.000	
2	Kapadana untuk Lembaga dan Kado Sama dengan Sektor Swasta untuk Peningkatan Infrastruktur serta Sarana dan Peralatan Lembaga Peternak Sapi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kapadanan/Kapadana dalam rangka Optimalisasi Kapadana Infrastruktur dan Peningkatan Sarana Peralatan Peternak Sapi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	80.000.000	Kapadana untuk Lembaga dan Kado Sama dengan Sektor Swasta untuk Peningkatan Infrastruktur serta Sarana dan Peralatan Lembaga Peternak Sapi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kapadanan/Kapadana dalam rangka Optimalisasi Kapadana Infrastruktur dan Peningkatan Sarana Peralatan Peternak Sapi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	80.000.000	
3	Pengadaan Sarana Peternak Kado Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sarana Peternak Kado	100 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana Peternak Kado Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sarana Peternak Kado	100 Unit	100.000.000	
	Pembiayaan Lembaga Peternak Kado Swasta		Jumlah lembaga peternak yang terbiaya	10 Lembaga	10.000.000	Pembiayaan Lembaga Peternak Kado Swasta		Jumlah lembaga peternak yang terbiaya	10 Lembaga	10.000.000	
4	Pembiayaan Lembaga Peternak Kado Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Peternak Kado Swasta yang Didana	10 Lembaga	10.000.000	Pembiayaan Lembaga Peternak Kado Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Peternak Kado Swasta yang Didana	10 Lembaga	10.000.000	





No	Pencapaian Hasil RPJPD					Hasil Kinerja Kelembagaan					
	Program/ Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target pencapaian kinerja	Pagu Indikasi	Program/ Kegiatan	Luas	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target pencapaian kinerja	Pagu Indikasi	Catatan Penting
	Pelayanan Intake/ward of COVID-19		Jumlah Layanan Intake Koro	70 Pasien/or	1.679.000.000	Pelayanan Intake/ward of COVID-19	7	Jumlah Layanan Intake Koro	70 Pasien/or	1.679.000.000	
1	Pelayanan dan Bimbingan Jember bagi Pasien Koro	Dataran bagi CDR Koro	Jumlah Pasien Koro yang Mandapakan Pelayanan dan Bimbingan Jember	30 Orang	30.000.000	Pelayanan Kasampon Koro	Dataran bagi CDR Koro	Jumlah Pasien Koro yang Mandapakan Pelayanan dan Bimbingan Jember	30 Orang	30.000.000	
2	Pelayanan dan Bimbingan Jember bagi Pasien Koro	Dataran bagi CDR Koro	Jumlah Pasien Koro yang Mandapakan Pelayanan dan Bimbingan Jember	10 Orang	72.000.000	Pelayanan dan Bimbingan Jember bagi Pasien Koro	Dataran bagi CDR Koro	Jumlah Pasien Koro yang Mandapakan Pelayanan dan Bimbingan Jember	10 Orang	72.000.000	
3	Pelayanan Kasampon Koro	CDR Koro Koro	Jumlah Pasien Koro yang Mandapakan Pelayanan Kasampon Koro	183 Orang	1.800.000.000	Pelayanan Kasampon Koro	CDR Koro Koro	Jumlah Pasien Koro yang Mandapakan Pelayanan Kasampon Koro	183 Orang	1.800.000.000	
	Pelayanan Intake/ward of COVID-19		Jumlah Layanan Intake Koro	183 Orang	100.000.000	Pelayanan Intake/ward of COVID-19		Jumlah Layanan Intake Koro	183 Orang	100.000.000	
4	JOB FOR BUND Koro	CDR Koro Koro	Jumlah Pasien Koro yang Mandapakan Pelayanan melalui JOB FOR BUND Koro	30 Orang	10.000.000	JOB FOR BUND Koro	CDR Koro Koro	Jumlah Pasien Koro yang Mandapakan Pelayanan melalui JOB FOR BUND Koro	30 Orang	10.000.000	
V	PROGAM KEBANGGAAN KEBANGGAAN		Persentase Koro Persentase Koro	100%	7.444.754.000	PROGAM KEBANGGAAN KEBANGGAAN		Persentase Koro Persentase Koro	100%	7.444.754.000	





No	Rencana Kerja RPJG					Kerangka Acuan Kegiatan					
	Program Kegiatan	Isi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	TARGET Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Isi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	TARGET Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2	Pemeliharaan Rencan dan informasi tentang hubungan industri dan komunitas serta tenaga kerja	Dataran dan Cakupan	Jumlah Data dan informasi tentang hubungan industri dan komunitas serta tenaga kerja sebagai Pemas Jaminan serta Penguatan	2 Laporan	180.000.000	Pemeliharaan Rencan dan informasi tentang hubungan industri dan komunitas serta tenaga kerja	Dataran dan Cakupan	Jumlah Data dan informasi tentang hubungan industri dan komunitas serta tenaga kerja sebagai Pemas Jaminan serta Penguatan	2 Laporan	180.000.000	
	Pemeliharaan Rencan dan informasi tentang hubungan industri, tenaga kerja dan Penguatan Rencan dan Cakupan		Jumlah Rencan dan informasi tentang hubungan industri, tenaga kerja dan Penguatan Rencan dan Cakupan	20 Penguatan dan	7.254.754.000	Pemeliharaan Rencan dan informasi tentang hubungan industri, tenaga kerja dan Penguatan Rencan dan Cakupan		Jumlah Rencan dan informasi tentang hubungan industri, tenaga kerja dan Penguatan Rencan dan Cakupan	20 Penguatan dan	7.254.754.000	
3	Pemeliharaan Rencan dan informasi tentang hubungan industri, tenaga kerja dan Penguatan Rencan dan Cakupan	Dataran dan Cakupan	Jumlah Rencan dan informasi tentang hubungan industri, tenaga kerja dan Penguatan Rencan dan Cakupan	12 Penguatan	80.000.000	Pemeliharaan Rencan dan informasi tentang hubungan industri, tenaga kerja dan Penguatan Rencan dan Cakupan	Dataran dan Cakupan	Jumlah Rencan dan informasi tentang hubungan industri, tenaga kerja dan Penguatan Rencan dan Cakupan	12 Penguatan	80.000.000	

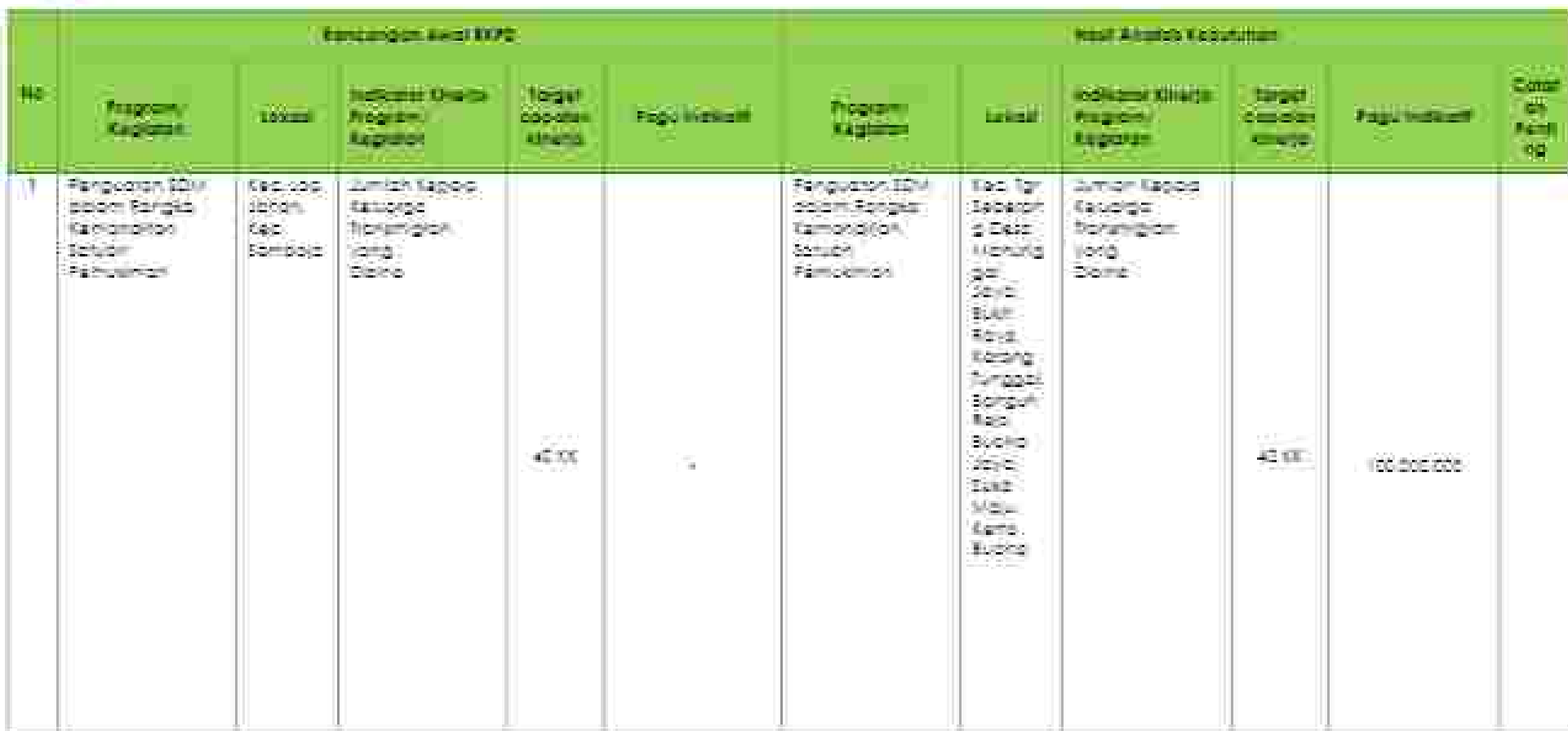


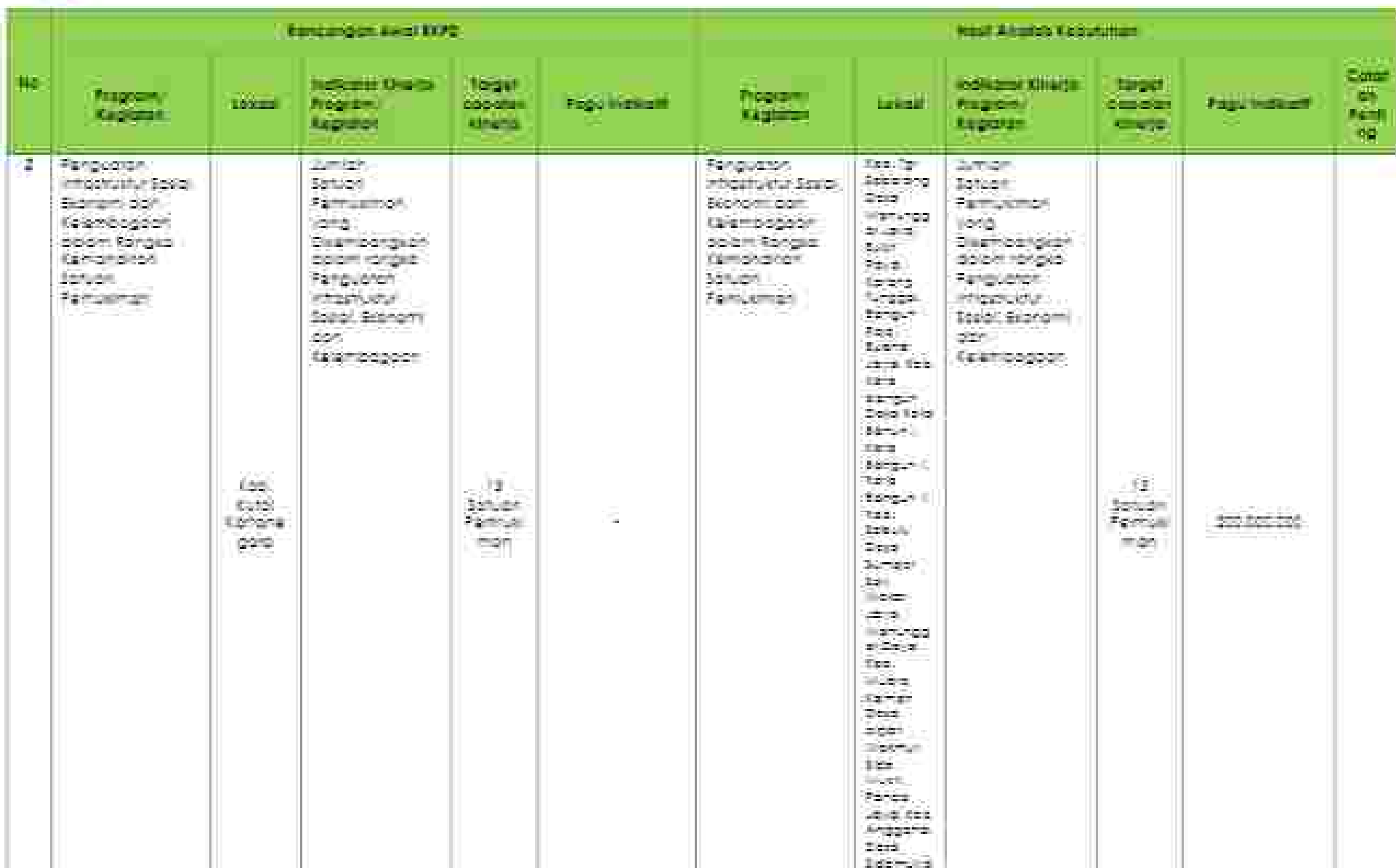


No	Rancangan Kerja RPJG					Kerangka Akutitas Keperawatan					
	Program Kegiatan	Isi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	Program Kegiatan	Isi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	Catatan Penting
2	Operasional Jamkesmas Terpadu (Jatidiri) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Jamkesmas Terpadu (Jatidiri) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	Operasional Jamkesmas Terpadu (Jatidiri) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Jamkesmas Terpadu (Jatidiri) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	
	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lainnya	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lainnya	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lainnya	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lainnya	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	
3	PROGRAM PERENCANAAN KEMASUKAN TRANSKRIPSI		Jumlah Rasio pengembangan kawasan kesehatan	2 Dokumen	150.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KEMASUKAN TRANSKRIPSI		Jumlah Rasio pengembangan kawasan kesehatan	2 Dokumen	150.000.000	
4	Pengembangan pelayanan kesehatan	Pengembangan pelayanan kesehatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	Pengembangan pelayanan kesehatan	Pengembangan pelayanan kesehatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	
	Pengembangan pelayanan kesehatan	Pengembangan pelayanan kesehatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	Pengembangan pelayanan kesehatan	Pengembangan pelayanan kesehatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	
5	Adaptasi dan Monev/evaluasi Rancangan/ Kegiatan	Adaptasi dan Monev/evaluasi Rancangan/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	Adaptasi dan Monev/evaluasi Rancangan/ Kegiatan	Adaptasi dan Monev/evaluasi Rancangan/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tipe dan/atau Risiko	Pagu Indikasi	



No	Rencana Kerja RPJG					Rencana Kerja RPJG					
	Program Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target outcome kinerja	Pagu Indikasi	Program Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target outcome kinerja	Pagu Indikasi	Catatan Penting
I	Pengembangan Peningkatan Fasilitas untuk Layanan Transmigrasi	Cost Effectiveness	Jumlah Dokumen Usulan Peningkatan Fasilitas untuk Layanan Transmigrasi	2 Dokumen	500.000.000	Pengembangan Peningkatan Fasilitas untuk Layanan Transmigrasi	Cost Effectiveness	Jumlah Dokumen Usulan Peningkatan Fasilitas untuk Layanan Transmigrasi	2 Dokumen	500.000.000	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN TRANSKRASI		Jumlah Layanan Pengambungan Data Transmigrasi	1 Data	-	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN TRANSKRASI		Jumlah Layanan Pengambungan Data Transmigrasi	1 Data	500.000.000	
	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Data Fasilitas Transmigrasi		Jumlah Fasilitas Pengambungan Data Transmigrasi	1 Data	-	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Data Fasilitas Transmigrasi		Jumlah Fasilitas Pengambungan Data Transmigrasi	1 Data	500.000.000	







No	Rancangan Awal RPPC					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan di Pemb ng
	Program/ Kegiatan	Isi/isi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tingkat capaian kinerja	Pagu Indikasi	Program/ Kegiatan	Isi/isi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tingkat capaian kinerja	Pagu Indikasi	
	Jumlah				30.083.974,674	Jumlah				29.829.974,674	

Pada tabel 3 tersebut Rancangan Awal Program dan Kegiatan terdapat 7 Program dan 44 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.083.974.674,- Setelah dilakukan Analisis Kebutuhan Menjadi 7 Program dan 45 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.29.829.974.674,-



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENA) Perangkat Daerah Tahun 2023 ini berdasarkan usulan masyarakat khusus penentuan calon tenaga kerja yang akan dilatih melalui Musrenbang OPD tingkat Provinsi dan Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Distramaker telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Distramaker Kab. Kutai tahun 2023. Berdasarkan hasil telaah diatas, penentuan isu strategis didasarkan pada hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telaah Visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, telaahan renstra kementerian/lmbaga dan Provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka diuraikanlah program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

No	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN				Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besarnya Volume	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PELATIHAN KBBK DARI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Kompartemen		
	Pengadaan Pasokan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	
1	Proses pengadaan pendidikan dan pelatihan sistematisasi bagi pencari kerja berdasarkan waktu kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompartemen (sede Tahun P	320 Orang	
2	Koordinasi lintas lembaga dan kaita serta dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan struktur kaita swasta dan Pemerintah Lembaga Pelatihan Kaita	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasagokan/Koordinasi selain ringkas Optimalisasi Kompetensi Jumlah dan Peningkatan Sektor Pemerintah Pelatihan Kaita dan Produktivitas kaita Tahun P	20 lembaga	
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kaita Kabupaten Kaita	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan dan Peningkatan Sarana Pelatihan Kaita	130 unit	
	Pengadaan Lembaga Pelatihan Kaita Swasta		Jumlah Lembaga pelatihan kaita yang tersedia	Lembaga	
4	Pengadaan Lembaga Pelatihan Kaita Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kaita Swasta yang Terdapat	11 lembaga	
	Konsultasi Produktivitas kaita Pengadaan Kaita		Jumlah perusahaan kaita yang produktif	Pengadaan	
5	Pengadaan Konsultasi Produktivitas kaita Pengadaan Kaita	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Kaita yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Pengadaan	



No	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN				Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran Volume	
1	2	3	4	5	6
II	PROGRAM PEMBERANAIHAN TENAGA KERJA		Disusun Laporan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kabupaten		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Daerah	
I	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Madya	Kab. Kota Langkagaya	Jumlah Penyusunan Tangkapan RTK Madya Kabupaten Kota	20 Penyusunan	
III	PROGRAM PEMBERANTAHAN TENAGA KERJA		Pengantar Tenaga Kerja Yang Dipersempit (Dokumentasi) Madya (Kategori) Laporan Antar Kota Dalam Wilayah Kabupaten		
	Pengantar Laporan di Daerah Kabupaten Kota		Jumlah Laporan Antar Kota	60000	
1	Penyusunan dan Bimbingan jabatan bagi Penerima Kerja	Ditjenbaker Kab. Kota	Jumlah Penerima Kerja yang Mendaftar Penyusunan dan Bimbingan jabatan	50 Orang	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (Keterampilan Kerja)	Ditjenbaker Kab. Kota	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendaftar Penerima Kerja (Keterampilan Kerja)	10 Orang	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (Keterampilan Kerja)	Ditjenbaker Kab. Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Dididik dan Madya (Keterampilan Kerja)	150 Orang	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Informasi pasar kerja	3000	
4	Jasa Penyaluran Kerja	Kab. Kota Langkagaya	Jumlah Penerima Kerja yang Mendaftar Penerima Kerja (Keterampilan Kerja)	40 Orang	
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Pengantar Kerja Penerimaan Hubungan Industrial yang di Penerima	100	
	Pengantar Penerimaan Penerimaan dan Penerimaan Penerimaan Kerja Bersama untuk Penerima yang Madya (Keterampilan Kerja)		Jumlah Penerimaan Penerimaan yang Madya dan Penerimaan Kerja yang Madya (Keterampilan Kerja)	Jumlah Penerimaan	
1	Pengantar Penerimaan Penerimaan bagi Penerimaan	Ditjenbaker Kab. Kota	Jumlah Penerimaan yang Mendaftar Penerimaan Penerimaan yang Madya (Keterampilan Kerja)	20 Penerimaan	
	Penyelenggaraan Penerimaan dan Informasi (Keterampilan Kerja) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Ditjenbaker Kab. Kota	Jumlah Data dan Informasi (Keterampilan Kerja) (Keterampilan Kerja) dan (Keterampilan Kerja) dan (Keterampilan Kerja)	20000	
	Pengantar dan Penyelenggaraan Penerimaan Hubungan Industrial (Keterampilan Kerja) dan (Keterampilan Kerja) dan (Keterampilan Kerja)		Jumlah Penerimaan Penerimaan yang Madya (Keterampilan Kerja) dan (Keterampilan Kerja) dan (Keterampilan Kerja)	Penerimaan	
3	Pengantar Penerimaan Hubungan Industrial (Keterampilan Kerja)	Ditjenbaker Kab. Kota	Jumlah Penerimaan yang Madya (Keterampilan Kerja)	15 Penerima	



No	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN				Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Beberapa Volume	
1	2	3	4	5	6
	Kepa. dan Peningkatan Penjualan yang Berkelanjutan Berdampak pada Kesejahteraan di (Sulu) Daerah Kabupaten/Kota				
4	Peningkatan Penjualan Hubungan Industri, Modal Kepa. dan Peningkatan Penjualan yang Berkelanjutan Berdampak pada Kesejahteraan di (Sulu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditambahakan Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok yang Peningkatan	100 Pemasok	
5	Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kapasitas pada Organisasi Peningkatan Pemasok dan Peningkatan Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok dan Pemasok	Ditambahakan Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	6 Pemasok	
6	Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kapasitas pada Organisasi Peningkatan Pemasok dan Peningkatan Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok dan Pemasok	Ditambahakan Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok yang Peningkatan	20 Pemasok	
7	Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kapasitas pada Organisasi Peningkatan Pemasok dan Peningkatan Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok dan Pemasok	Ditambahakan Kab. Kutar	Peningkatan Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSAKSI		Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan		
	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok		Peningkatan Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
9	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
10	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSAKSI		Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan		
	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok		Peningkatan Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
12	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
13	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
14	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
15	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
16	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
17	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
18	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
19	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	
20	Peningkatan Pemasok untuk Kawasan Pemasok	Kab. Kutar	Jumlah Pemasok Pemasok dan Pemasok Pemasok yang Peningkatan	10.440 Orang	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional, arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bagian dari arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wilayah.

Urusan Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan berbasis masyarakat
- b. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya
- c. Meningkatkan informasi lowongan kerja
- d. Optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penertaman tenaga kerja
- e. Optimalisasi informasi lowongan kerja dan tidak lanjut dari program yang telah dijalankan
- f. Meningkatkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
- g. Meningkatkan pelayanan kepersertaan jamsostek
- h. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
- i. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - Menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial (HI)
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi

Urusan Ketransmigrasian

- a. Telah dilaksanakannya penyempurnaan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Kota Bangun, dan penyusunan rencana kawasan Kecamatan Tabang. Untuk RKT Kecamatan Kota Bangun menunggu hasil penilaian dari TIM Pusat untuk penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi
- b. Setelah adanya penetapan RNT dari Pemerintah Pusat akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Satuan Kawasan Permukiman (RTSKP).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan Distransaker Kab. Kutai adalah sebagai berikut :



No	Nama Program	Sumber Dana	Peninggung Jarak
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	APBD	Bidang Pembinaan, Pembudayaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD	
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD	
4.	Program Hubungan Industrial	APBD	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Produktivitas Kerja dan Lompatan Sosial Tenaga Kerja
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	APBD	Bidang Perencanaan Kawasan, Pembangunan Desa dan Pemukiman Transmigrasi
6.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	APBD	Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Transmigrasi
7.	Program Pengembangan Kawasan	APBD	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Untuk mewujudkan Visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN 5 TGA TAHUN 2021-2026				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja daerah kerja		Target Kesempatan Kerja	92,5%	95,35%	95,4%	95,75%	92,90%
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berkarya di bidang	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	300 Orang (14,75%)	300 Orang (15,35%)	300 Orang (20,43%)	300 Orang (25,27%)	300 Orang (30,11%)
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja sesuai informasi kebutuhan pasar kerja dan kewaspadaan daerah	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang terdistribusi di berbagai daerah	4,4%	5,3%	6,3%	12,5%	14,3%
		Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis	Persentase Kasus Penanganan Hubungan Industrial yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya portabilitas Penempatan daerah dan lintas daerah pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi		Lompatan Sosial Transmigrasi yang berkembang	2	4	4	5	5



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
		Meningkatkan Penguasaan Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan	Jumlah Kawasan Perumahan yang di raih/dibangun	2	4	4	5	5
			Jumlah Kawasan Perumahan yang di raih/dibangun	1	1	1	1	1
			Jumlah Kawasan Perumahan yang di bangun	2	2	2	1	2
			Jumlah Kawasan Perumahan yang di raih/dibangun	2	2	2	2	1
B	Meningkatkan Penguasaan dan Peningkatan yang berkualitas dan modern		Nila Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemerintahan (AKD)	71,25	71,50	72,00	72,25	72,5
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Tenaga Kerja	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Tenaga Kerja	71,25	71,50	72,00	72,25	72,5

Untuk mencapai Misi Dinas telah ditetapkan Indek Kinerja Utama (IKU) sebagai alat mengukur sekaligus pedoman dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian dengan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

1. **Tujuan** : Peningkatan kompetensi pencari kerja yang bersertifikat terlatih dan berdaya saing sesuai kebutuhan pasar kerja (Kukar nap Kerja).
dengan **Sasaran** :
a. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
b. Meningkatnya Pencari Kerja yang diterima di pasar kerja
c. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis
2. **Tujuan** : Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian.
dengan **Sasaran** : Meningkatkan penyediaan dan penataan kawasan desa Kim Trans.
3. **Tujuan** : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani
dengan **Sasaran** : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai salah satu Program Dedikasi Kukar Idaman yaitu Program Kukar Siap Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara diperintahkan untuk merealisasikan Misi kedua Kukar Idaman, yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya. Program Kukar Siap Kerja merupakan salah satu permintaan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terkait penempatan sumber daya manusia, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitasi kemitraan tenaga kerja secara terintegrasi. Mulai dari peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja, dengan membangun dan memperkuat pusat pelatihan tenaga kerja atau vokasi setiap zona baik hulu, tengah, pesisir. Hingga fasilitasi akses ke lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan target pelatihan sebanyak 6.000 pencari kerja selama periode 2021-2026. Dalam rangka mendukung program tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang bekerja sendiri, namun memerlukan peran sejumlah pihak, lintas OPD dan juga pelaku usaha. Selain itu memerlukan dukungan dari segi pembiayaan yang dapat bersumber dari APBD, APBN dan ADD Desa.

Berikut ini Rencana Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2023 dan prakiraan Program dan Kegiatan tahun 2024 seperti pada Tabel 5 (lima) dibawah ini :



Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
Dan Prakiraan Mayu Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Diversi dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Mayu Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70,11%	12.557.270.574			70,11%	14.575.681.475
		Pengembangan Pelayanan dan Efektivitas Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Efektivitas Perangkat Daerah		8 Dokumen	150.000.000			8 Dokumen	150.000.000
1		Penyusunan Dokumen Pengembangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan Perangkat Daerah	Ditandatangani di Kab. Kutai	8 Dokumen	150.000.000	APBD		8 Dokumen	150.000.000
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah	Ditandatangani di Kab. Kutai	3 Laporan	100.000.000	APBD		3 Laporan	100.000.000
		Akreditasi Kelengkapan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kelengkapan Perangkat Daerah		1 Dokumen	10.000.000.000			1 Dokumen	11.144.122.475
3		Pelayanan Gizi dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gizi dan Tunjangan ASN	Ditandatangani di Kab. Kutai	83 orang/ bulan	8.975.000.787	APBD		83 orang/ bulan	10.944.122.475
4		Koordinasi dan Pembinaan Laporan Keuangan Antar Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Antar Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pembinaan Laporan Keuangan Antar Tahun SKPD	Ditandatangani di Kab. Kutai	1 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000



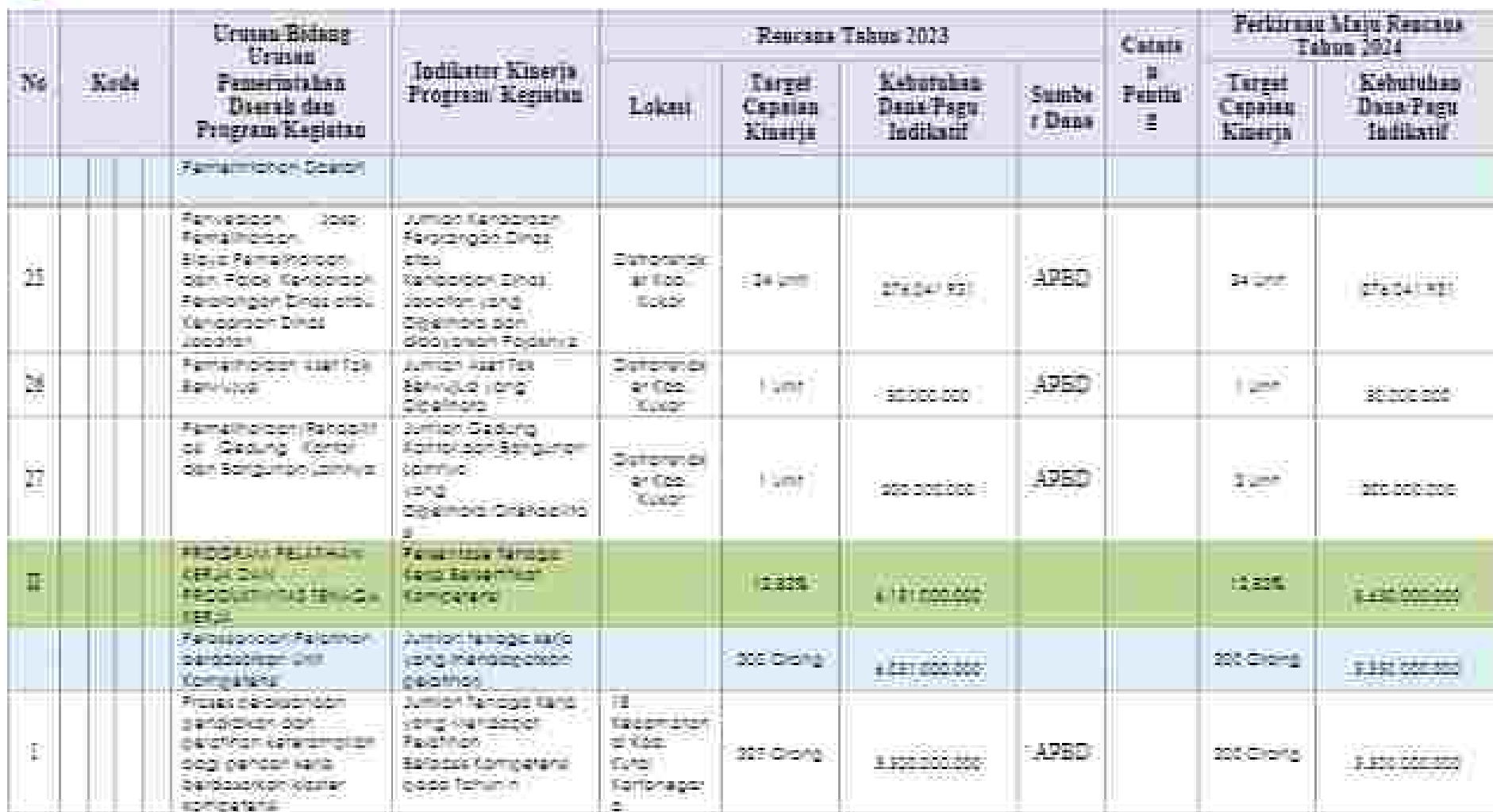
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Aktivitas Bidang Muka Daerah pada Peringatan Daerah	Jumlah Laporan Bidang Muka Daerah BPD yang Memonitoring Pelaksanaan		1 Dokumen	75.000.000			1 Dokumen	75.000.000
5		Asesmen dan Penyusunan Laporan Bidang Muka Daerah pada BPD	Jumlah Laporan Realisasi dan Penyusunan Laporan Bidang Muka Daerah pada BPD	Distrik dan Kab. Kutai	1 Laporan	75.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000
		Aktivitas Kegiatan dan Peringatan Daerah	Jumlah Kegiatan dan Peringatan		124 Orang	200.000.000			124 Orang	200.000.000
6		Monev, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distrik dan Kab. Kutai	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
7		Pemilihan dan Penilaian Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pemilihan dan Penilaian	Distrik dan Kab. Kutai	10 Orang	200.000.000	APBD		10 Orang	200.000.000
8		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Distrik dan Kab. Kutai	85 Orang	30.000.000	APBD		85 Orang	30.000.000
9		Emulasi, Tesis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Emulasi, Tesis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Distrik dan Kab. Kutai	10 Orang	18.000.000	APBD		10 Orang	18.000.000
		Aktivitas Umum Peringatan Daerah	Jumlah Laporan Komunitas umum		12 Foket	125.700.000			12 Foket	125.700.000
10		Penyediaan	Jumlah Foket	Distrik dan Kab. Kutai	1 Foket		APBD		1 Foket	



No	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kontribusi Instalasi Listrik Perumahan Bangunan Kantor yang Didirikan	Kondisi Instalasi Listrik Perumahan Bangunan Kantor yang Didirikan	di Kab. Kutai		25.700.000				25.700.000
11		Penyediaan Fasilitas dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Fasilitas Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Didirikan	Ditentukan di Kab. Kutai	1 Fasilitas	30.000.000	APBD		1 Fasilitas	30.000.000
12		Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Jumlah Fasilitas Peralatan Rumah Tangga yang Didirikan	Ditentukan di Kab. Kutai	1 Fasilitas	30.000.000	APBD		1 Fasilitas	30.000.000
13		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Fasilitas Bahan Logistik Kantor yang Didirikan	Ditentukan di Kab. Kutai	1 Fasilitas	30.000.000	APBD		1 Fasilitas	30.000.000
14		Penyediaan Ruang Cakupan dan Pengabdian	Jumlah Fasilitas Ruang Cakupan dan Pengabdian yang Didirikan	Ditentukan di Kab. Kutai	4 Fasilitas	30.000.000	APBD		4 Fasilitas	30.000.000
15		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Fasilitas Bahan Material yang Didirikan	Ditentukan di Kab. Kutai	1 Fasilitas	23.000.000	APBD		1 Fasilitas	23.000.000
16		Realisasi Kunjungan Tama	Jumlah Laporan Realisasi Kunjungan Tama	Ditentukan di Kab. Kutai	12 Laporan	25.000.000	APBD		12 Laporan	25.000.000
17		Pengembangan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ditentukan di Kab. Kutai	12 Laporan	220.000.000	APBD		12 Laporan	220.000.000
		Pengadaan Ruang Unit Daerah Pemungut Uang Pembiayaan Daerah	Jumlah Unit B&G yang Didirikan		2 Unit	-			2 Unit	1.001.000.000
18		Pengadaan Fasilitas dan Meubel Furnitur	Jumlah Unit B&G yang Didirikan	Ditentukan di Kab.	unit	-	APBD		4 unit	-



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Kotor						
19		Pengadaan Gedung Kantor Baru Sanggau Lanteh	Jumlah Unit Gedung Kantor Baru Sanggau Lanteh yang Disediakan	Ditronomok di Kotor	Unit	-	APBD		2 Unit	1.001.000.000
20		Pengadaan Sprong dan Pasirong Pemukiman Gedung Kantor Baru Sanggau Lanteh	Jumlah Unit Pasirong dan Sprong yang Disediakan	Ditronomok di Kotor	Unit	-	APBD		5 Unit	-
		Pembiayaan Jasa Perundingan Usahat Pemukiman Daerah	Jumlah Kasus Pembiayaan Jasa Perundingan Usahat Pemukiman Daerah yang Disediakan		12 Kasus	1.044.819.934			12 Kasus	1.044.819.934
21		Pembiayaan Jasa Surat Mawaruf	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Surat Mawaruf	Ditronomok di Kotor	12 Laporan	4.000.000	APBD		12 Laporan	4.000.000
22		Pembiayaan Jasa Komunitas, Sumber Daya, Ardan Lanteh	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Komunitas, Sumber Daya, Ardan Lanteh yang Disediakan	Ditronomok di Kotor	12 Laporan	300.000.000	APBD		12 Laporan	300.000.000
23		Pembiayaan Jasa Pasirong, Jasa Pembiayaan Kantor	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Pasirong dan Pembiayaan Kantor yang Disediakan	Ditronomok di Kotor	12 Laporan	47.847.000	APBD		12 Laporan	47.847.000
24		Pembiayaan Jasa Pembiayaan Usahat Kantor	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Pembiayaan Usahat Kantor yang Disediakan	Ditronomok di Kotor	12 Laporan	471.042.934	APBD		12 Laporan	471.042.934
		Pembiayaan Sprong, Jasa, Sprong Perundingan Usahat	Jumlah Jasa Tetap Lanteh yang Disediakan		24 Unit	224.041.934			24 Unit	224.041.934





No	Kode	Urutan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2		Koordinasi (Monev) Lembaga dan Kede- sain dengan Sektor Swasta untuk Pelayanan Pembiayaan Serta Sarana dan Peningkatan Lembaga Pemerintah Kota	Jumlah Kasasioklaton/Kasasiok- laton dalam rangka Gempolokan Kapasitas Pembiayaan dan Peningkatan Sarana Peningkatan Pembiayaan Monev dan Produktivitas pada Tahun	Kec. Kota Kotabaru	20 Lembaga	30.000.000	APBD		20 Lembaga	30.000.000
3		Pengadaan Sarana Pemerintah Kota Kabupaten Kota	Jumlah Pengadaan dan Peningkatan Sarana Pemerintah Kota	Kec. Kota Kotabaru	10 unit	30.000.000	APBD		0	0
		Peningkatan Lembaga Pemerintah Kota Swasta	Jumlah lembaga pemerintah kota yang terdaftar		10 Lembaga	30.000.000			10 Lembaga	30.000.000
4		Peningkatan Lembaga Pemerintah Kota Swasta	Jumlah Lembaga Pemerintah Kota Swasta yang daftar	Kec. Kota Kotabaru	11 Lembaga	30.000.000	APBD		10 Lembaga	30.000.000
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif		100 Perusahaan	30.000.000			100 Perusahaan	30.000.000
5		Pengadaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kec. Kota Kotabaru	20 Perusahaan	30.000.000	APBD		20 Perusahaan	30.000.000
III		PROGRAM PENGENDAHAN TEKNIK KETAJUK	Capaian layanan dan manfaat terhadap warga masyarakat		1 Dokumentasi	10.000.000			1 Dokumentasi	10.000.000
		Pengawasan Rencana Tahun Kota (RT)	Jumlah Data Rencana Tahun Kota Swasta		1 Dokumentasi	10.000.000			1 Dokumentasi	10.000.000
1		Pengawasan Rencana	Jumlah Pengawasan	Setelah	20				1 Data	



No	Kode	Urutan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Tenaga Kerja Muka	Jumlah karyawan tetap	di Kab. Kotar	Pemerintah	100.000.000				100.000.000
IV		PROGRAM PERBUATAN TERBUKA (PTB)	Pembayaran Tenaga Kerja yang Disempatan dalam suatu kegiatan melalui mekanisme jabatan tidak tetap dalam waktu 3 (tiga) bulan		64%	2.000.000.000			64%	1.679.000.000
		Pembayaran Antar Kelas di Daerah Kabupaten Kota	Jumlah karyawan Antar Kelas		75 Pembayaran	1.429.000.000			75 Pembayaran	1.429.000.000
1		Pembayaran dan Simbolon Jabatan bagi Pardon Kera	Jumlah Pardon Kera yang mendapatkan Pembayaran dan Simbolon Jabatan	Distrik di Kab. Kotar	30 Orang	50.000.000	APBD		30 Orang	50.000.000
2		Pembayaran dan Simbolon Jabatan bagi Pardon Kera	Jumlah Pardon Kera yang mendapatkan Pembayaran dan Simbolon Jabatan	Distrik di Kab. Kotar	15 Orang	25.000.000	APBD		15 Orang	25.000.000
3		Pembayaran dan Simbolon Jabatan bagi Pardon Kera	Jumlah Pardon Kera yang mendapatkan Pembayaran dan Simbolon Jabatan	Kab. Kota Kalimantan	188 Orang	1.800.000.000	APBD		188 Orang	1.800.000.000
		Pembayaran dan Simbolon Jabatan bagi Pardon Kera	Jumlah Pardon Kera yang mendapatkan Pembayaran dan Simbolon Jabatan		188 Orang	1.800.000.000			188 Orang	1.800.000.000
4		Jasa Pardon Kera	Jumlah Pardon Kera yang mendapatkan Jasa Pardon Kera	Kab. Kota Kalimantan	40 Orang	100.000.000	APBD	Program ini termasuk dalam kategori Sisa	40 Orang	100.000.000



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting Kerja	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		PENGUKUR HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pelaksanaan Kerja Pemukiman Hubungan Industrial yang 3 Sektor		100%	7.444.704.000			100%	800.000.000
			Jumlah Pemukiman Perusahaan yang diberikan dan diberikan kerja yang disediakan oleh Pemukiman Kerja Bersama yang di berikan		100 Perusahaan	200.000.000			100 Perusahaan	200.000.000
2		Pengembangan Fasilitas Perusahaan dan Pemukiman Pemukiman Kerja Bersama untuk Pemukiman yang memiliki Sertifikat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemukiman yang telah diberikan Fasilitas Pemukiman yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Fasilitas di VLEP Online	Distrik/kecamatan di Kabupaten Kecamatan	100 Perusahaan	100.000.000	APBD		100 Perusahaan	100.000.000
			Pengembangan Fasilitas Perusahaan dan Pemukiman Pemukiman Kerja Bersama untuk Pemukiman yang memiliki Sertifikat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Distrik/kecamatan di Kabupaten Kecamatan	100 Perusahaan	100.000.000	APBD		100 Perusahaan	100.000.000
3		Pengembangan Fasilitas Perusahaan dan Pemukiman Pemukiman Kerja Bersama untuk Pemukiman yang memiliki Sertifikat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemukiman yang telah diberikan Fasilitas Pemukiman yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Fasilitas di VLEP Online	Distrik/kecamatan di Kabupaten Kecamatan	100 Perusahaan	100.000.000	APBD		100 Perusahaan	100.000.000
			Pengembangan Fasilitas Perusahaan dan Pemukiman Pemukiman Kerja Bersama untuk Pemukiman yang memiliki Sertifikat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Distrik/kecamatan di Kabupaten Kecamatan	100 Perusahaan	100.000.000	APBD		100 Perusahaan	100.000.000



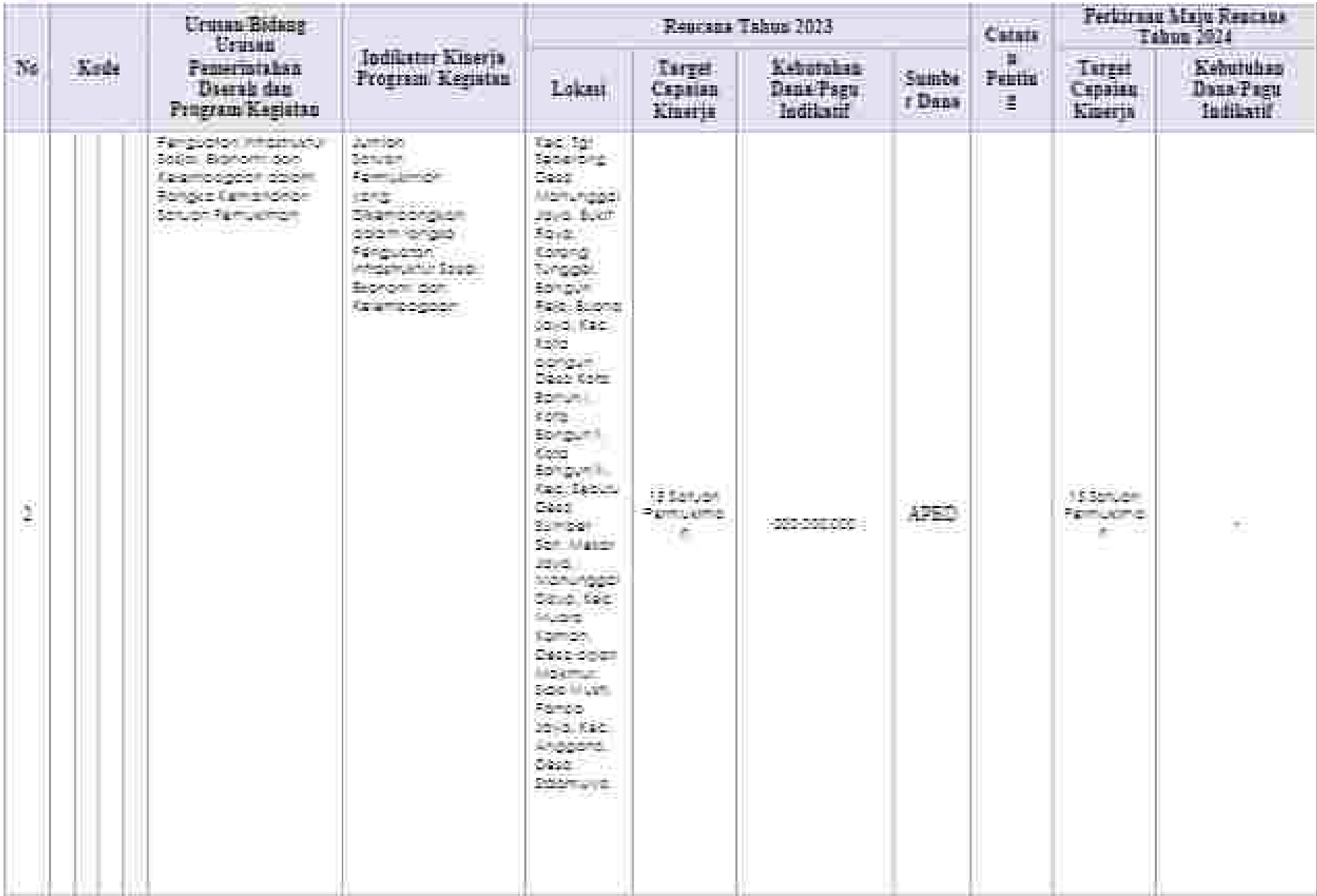
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kabupaten Kota								
3		Pencapaian Persentase Peningkatan Industri, Usaha Kecil dan Perumahan Perumahan yang Berkelanjutan pada Kecamatan di Kabupaten Kota	Jumlah Persentase yang Dicapai	Ditentukan di Kabupaten Kota	13 Persentase	85.000.000	APBD		13 Persentase	85.000.000
4		Pemaksimalan Persentase Peningkatan Industri, Usaha Kecil dan Perumahan Perumahan yang Berkelanjutan pada Kecamatan di Kabupaten Kota	Jumlah Persentase Peningkatan yang Dicapai	Ditentukan di Kabupaten Kota	100 Persentase	80.000.000	APBD		100 Persentase	80.000.000
5		Pemaksimalan Persentase Peningkatan pada Organisasi Persewaan, Persewaan dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non office	Jumlah Asosiasi Persewaan dan Serikat Pekerja yang Dicapai	Ditentukan di Kabupaten Kota	4 Asosiasi	80.000.000	APBD		4 Asosiasi	80.000.000
6		Pemaksimalan Operasional Lembaga Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga yang Dicapai	Ditentukan di Kabupaten Kota	20 Lembaga	80.000.000	APBD		20 Lembaga	80.000.000



No	Kode	Urutan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7		Pengembangan pelaksanaan program kerja tenaga kerja dan fasilitasi bagi pemangku daerah	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas bagi pemangku Pakar/ Jurnalis Rancangan pengembangan kawasan Desa Kintore	Dataran di Desa Kintore	33.440 Orang	1.194.704.000	APBD		30 Orang	30.000.000
VI		PROGRAN PENGEMBANGAN KAWASAN MANGROVE	Jumlah Rancangan pengembangan kawasan Desa Kintore		2 Dokumen	400.000.000			2 Dokumen	200.000.000
		Pengembangan lahan untuk kawasan mangrove	Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Rancangan kawasan mangrove (RKH)		2 Dokumen	400.000.000			2 Dokumen	200.000.000
1		Akses dan pembangunan Rancangan kawasan	Jumlah Rancangan Dapur Distrik/kecamatan untuk mendukung Rancangan kawasan mangrove	Kec. Catur Wulanegara	1 kawasan	100.000.000	APBD		1 kawasan	100.000.000
2		Pengembangan Rancangan lahan untuk kawasan mangrove	Jumlah Dokumen Rancangan pengembangan lahan untuk kawasan mangrove	Kec. Catur Wulanegara	2 Dokumen	300.000.000	APBD		2 Dokumen	100.000.000
III		PROGRAN PENGEMBANGAN KAWASAN MANGROVE	Jumlah Rancangan Desa Kintore yang akan dikembangkan		1 kawasan	300.000.000			1 kawasan	-
		Pengembangan lahan pemukiman pada lahan kawatir	Jumlah Rancangan pengembangan kawasan Desa Kintore		1 kawasan	300.000.000			1 kawasan	-



No	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Menuj Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		Penguatan SDN dalam Berkas Kamandak Setoran Penguatan	Junior Kappa Kampung Negeri yang Denda	Kec. Tgl Sedawang Desa Makungga Jaya. Suk Kaya Kandang Tunggal Bangun Batu. Benda Jaya. Suk Makungga Benda	40 tk	100.000.000	APBD		40 tk	.





No	Kode	Urutan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
JUMLAH						29.829.974.674				22.804.689.674

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Program dan Kegiatan yaitu sebesar Rp. 29.829.974.674,- dan perkiraan maju rencana tahun 2024 sebesar Rp. 22.804.689.675,-



BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Akhir Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan dokumen rencana tahunan yang didalamnya termuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Di dalam RENJA Akhir ini juga disampaikan indikator kinerja setiap program dan kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2023 sebagai salah satu tolok ukur kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan program dan kegiatan pada RENJA Perubahan ini telah mengacu pada Surat Edaran Bupati nomor : B-370/BAPP/V.1/065.II/02/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023. Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, masing-masing Bidang dalam jajaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini. Selain itu, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Disamping hal tersebut diatas bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya jajaran di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi dengan pendekatan secara formal maupun nonformal dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders). Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai dan mewujudkan Visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selubungan dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini, apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tenggarong, Agustus 2022

Kepala Dinas,

Ir. H. Ahmad Hardi Dwi Putra
Pembinas Utama Muda – IV/c
NIP. 196210251990111001

